

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 21 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 525);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 311);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);

28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);
32. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp. 5.178.056.704.816,- (lima trilyun seratus tujuh puluh delapan milyar lima puluh enam juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus enam belas rupiah) bertambah sejumlah Rp. 18.304.107.498,- (delapan belas milyar tiga ratus empat juta seratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp. 5.196.360.812.314,- (lima trilyun seratus sembilan puluh enam milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus dua belas ribu tiga ratus empat belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Semula Rp. 4.605.700.737.151,-

b. Bertambah Rp. 87.660.811.913,-

Jumlah pendapatan setelah perubahan

Rp. 4.693.361.549.064,-

2. Belanja :

a. Semula Rp. 5.167.056.704.816,-

b. (berkurang) (Rp. 8.791.874.157,-)Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 5.158.264.830.659,-

Defisit setelah perubahan (Rp. 464.903.281.595,-)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 572.355.967.665,-

2)(berkurang) (Rp. 69.356.704.415,-)

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 502.999.263.250,-

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 11.000.000.000,-

2) Bertambah Rp. 27.095.981.655 ,-Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 38. 095.981.655,-

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 464.903.281.595,-

Sisa lebih pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp. 0 ,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 2.353.324.920.469,-

2) (Berkurang) (Rp. 12.059.238.587,-)

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 2.341.265.681.882,-

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 1.404.313.958.313,-

2) Bertambah Rp. 5.182.974.619,-

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 1.409.496.932.932,-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 848.061.858.369,-

2) Bertambah Rp. 94.537.075.881,-

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 942.598.934.250,-

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 1.909.562.850.000,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Pajak daerah setelah perubahan Rp. 1.909.562.850.000,-

b. Retribusi daerah

1) Semula Rp. 251.896.629.645,-

2) (Berkurang) (Rp. 48.174.652.267,-)

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 203.721.977.378,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 82.515.616.099,-

2) Bertambah Rp. 15.136.705.074,-

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 97.652.321.173,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 109.349.824.725,-

2) Bertambah Rp. 20.978.708.606,-

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 130.328.533.331,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula Rp. 289.460.870.313,-

2) Bertambah Rp. 5.182.974.619,-

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 294.643.844.932,-

b. Dana alokasi umum

1) Semula Rp.1.061.625.528.000,-

2) Bertambah/ Rp. 0,-
(berkurang) _____Jumlah dana alokasi umum setelah
perubahan Rp.1.061.625.528.000,-

c. Dana alokasi khusus

1) Semula Rp. 53.227.560.000,-

2) Bertambah/ Rp. 0,-
(berkurang) _____Jumlah dana alokasi khusus setelah
perubahan Rp. 53.227.560.000,-(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/ Rp. 0,-
(berkurang) _____Jumlah pendapatan hibah setelah
perubahan Rp. 0,-

b. Dana darurat

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/ Rp. 0,-
(berkurang) _____

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 0,-

c. Dana bagi hasil pajak

1) Semula Rp. 572.387.440.423,-

2) Bertambah Rp. 34.646.349.799,-
_____Jumlah dana bagi hasil pajak setelah
perubahan Rp. 607.033.790.222,-

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula Rp. 249.878.398.918,-

2) Bertambah Rp. 59.940.726.082,-
_____Jumlah dana penyesuaian dan otonomi
khusus setelah perubahan Rp. 309.819.125.000,-

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp. 23.166.440.000,-

2) (berkurang) (Rp. 50.000.000,-)

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau
dari pemerintah daerah lainnya setelah
perubahan

Rp. 23.006.440.000,-

f. Dana bagi hasil lainnya

1) Semula Rp. 2.679.579.028,-

2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Dana bagi hasil lainnya

Rp. 2.679.579.028,-

g. Dana Insentif Daerah

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/
(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Dana bagi hasil lainnya

Rp. 0 ,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 1.971.510.082.985,-

2) Bertambah Rp. 77.300.379.998,-

Jumlah belanja tidak langsung setelah
perubahan

Rp. 2.048.810.462.983,-

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 3.195.546.621.831,-

2) (berkurang) (Rp. 86.092.254.155,-)

Jumlah belanja langsung setelah perubahan

Rp. 3.109.454.367.676,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah

1) Semula Rp.1.668.455.001.554,-

2) Bertambah Rp. 59.940.726.082,-

Jumlah belanja pegawai sejumlah setelah
perubahan

Rp. 1.728.395.727.636,-

b. Belanja bunga

1) Semula Rp. 5.425.660.144,-

2) Bertambah Rp. 220.676.400,-

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 5.646.336.544,-

c. Belanja subsidi

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah /
(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0,-

d. Belanja hibah

1) Semula Rp. 284.529.421.287,-

2) Bertambah Rp. 12.620.803.287,-

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 297.150.224.574,-

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 1.045.000.000,-Jumlah belanja bantuan sosial setelah
perubahan Rp. 1.045.000.000,-

f. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. 1.200.000.000,-

2) Bertambah Rp. 3.473.174.229,-

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 4.673.174.229,-

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp. 1.900.000.000,-

2) Bertambah /
(berkurang) Rp. 0,-Jumlah belanja bantuan keuangan setelah
perubahan Rp. 1.900.000.000,-

h. Belanja tidak Terduga

1) Semula Rp. 10.000.000.000,-

2) Bertambah /
(berkurang) Rp. 0,-Jumlah belanja tidak terduga setelah
perubahan Rp. 10.000.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah

1) Semula Rp. 388.997.942.475,-

2) Bertambah Rp. 12.720.092.921,-

Jumlah belanja pegawai sejumlah setelah perubahan Rp. 401.718.035.396,-

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 1.557.802.937.743,-

2) (berkurang) (Rp. 32.738.116.452,-)

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 1.525.064.821.291,-

c. Belanja modal

1) Semula Rp. 1.248.745.741.613,-

2) (berkurang) (Rp. 66.074.230.624,-)

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 1.182.671.510.989,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula Rp. 572.355.967.665,-

2) (berkurang) (Rp. 69.356.704.415,-)

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 502.999.263.250,-

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula Rp. 11.000.000.000,-

2) Bertambah Rp. 27.095.981.655,-

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 38.095.981.655,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula Rp. 572.355.967.665,-

2) (berkurang) (Rp. 69.356.704.415,-)

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 0,-

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,-

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,-
--	-----	-----

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,-

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,-
--	-----	-----

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,-

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,-
---	-----	-----

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,-

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp.	0,-
--	-----	-----

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,-

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>

Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.	0,-
--	-----	-----

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,-

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,-
--	-----	-----

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah
Rp. 0,-

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 5.174.485.000,-

Jumlah penyertaan modal (investasi)
pemerintah daerah setelah perubahan Rp. 5.174.485.000,-

c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 11.000.000.000,-

1) Semula Rp. 11.000.000.000,-

2) Bertambah Rp. 21.921.496.655,-

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang
jatuh tempo setelah perubahan Rp. 32.921.496.655,-

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,-

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah /
(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah
perubahan Rp. 0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran I A : Urusan Kas dan Perhitungan;
3. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
4. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
5. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
6. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
7. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

8. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
10. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Oktober 2012

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 22 Oktober 2012

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
Asisten Pemerintahan,

ttd.

HADISISWANTO ANWAR

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2012 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MT. Ekawati Rahayu, SH.

Penata Tingkat I

NIP. 19730504 199602 2 001

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINGKASAN PERUBAHAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2012

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(RP.)	%
1	Pendapatan Daerah				
1 1	Pendapatan Asli Daerah				
1 1 1	Hasil Pajak Daerah	1,909,562,850,000	1,909,562,850,000	0	0
1 1 2	Hasil Retribusi Daerah	251,896,629,645	203,721,977,378	(48,174,652,267)	(19.12)
1 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	82,515,616,099	97,652,321,173	15,136,705,074	18.34
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	109,349,824,725	130,328,533,331	20,978,708,606	19.18
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		2,353,324,920,469	2,341,265,681,882	(12,059,238,587)	(0.51)
1 2	Dana Perimbangan				
1 2 1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	289,460,870,313	294,643,844,932	5,182,974,619	1.79
1 2 2	Dana Alokasi Umum	1,061,625,528,000	1,061,625,528,000	0	0
1 2 3	Dana Alokasi Khusus	53,227,560,000	53,227,560,000	0	0
Jumlah Dana Perimbangan		1,404,313,958,313	1,409,496,932,932	5,182,974,619	0.37
1 3	Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah				
1 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	572,387,440,423	607,033,790,222	34,646,349,799	6.05
1 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	249,878,398,918	309,819,125,000	59,940,726,082	23.99
1 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	23,116,440,000	23,066,440,000	(50,000,000)	(0.22)
1 3 6	Bagi Hasil Lainnya	2,679,579,028	2,679,579,028	0	0
Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah		848,061,858,369	942,598,934,250	94,537,075,881	11.15
Jumlah Pendapatan Daerah		4,605,700,737,151	4,693,361,549,064	87,660,811,913	1.90
2	Belanja Daerah				
2 1	Belanja Tidak Langsung				
2 1 1	Belanja Pegawai	1,668,455,001,554	1,728,395,727,636	59,940,726,082	3.59
2 1 2	Belanja Bunga	5,425,660,144	5,646,336,544	220,676,400	4.07
2 1 4	Belanja Hibah	284,529,421,287	297,150,224,574	12,620,803,287	4.44
2 1 5	Belanja Bantuan Sosial	0	1,045,000,000	1,045,000,000	100.00
2 1 6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1,200,000,000	4,673,174,229	3,473,174,229	289.43
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1,900,000,000	1,900,000,000	0	0
2 1 8	Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000	10,000,000,000	0	0
Jumlah Belanja Tidak Langsung		1,971,510,082,985	2,048,810,462,983	77,300,379,998	3.92
2 2	Belanja Langsung				
2 2 1	Belanja Pegawai	388,997,942,475	401,718,035,396	12,720,092,921	3.27
2 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1,557,802,937,743	1,525,064,821,291	(32,738,116,452)	(2.10)
2 2 3	Belanja Modal	1,248,745,741,613	1,182,671,510,989	(66,074,230,624)	(5.29)
Jumlah Belanja Langsung		3,195,546,621,831	3,109,454,367,676	(86,092,254,155)	(2.69)
Jumlah Belanja Daerah		5,167,056,704,816	5,158,264,830,659	(8,791,874,157)	(0.17)
SURPLUS/ (DEFISIT)		(561,355,967,665)	(464,903,281,595)	96,452,686,070	(17.18)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(RP.)	%
3	Pembiayaan Daerah				
3 1	Penerimaan Pembiayaan Daerah				
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	572,355,967,665	502,999,263,250	(69,356,704,415)	(12.12)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah		572,355,967,665	502,999,263,250	(69,356,704,415)	(12.12)
3 2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah				
3 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	0	5,174,485,000	5,174,485,000	100.00
3 2 3	Pembayaran Pokok Utang	11,000,000,000	32,921,496,655	21,921,496,655	199.29
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah		11,000,000,000	38,095,981,655	27,095,981,655	246.33
Jumlah Pembiayaan Daerah Neto		561,355,967,665	464,903,281,595	(96,452,686,070)	(17.18)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)		0	0	0	0

Surabaya, 22 Oktober 2012
WALIKOTA SURABAYA

TRI RISMAHARINI

[illegible]

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA							
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA		
1	2	Rp.	Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%
1 05	Penataan Ruang			5=4-3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
1 05 0100	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	65,000,000,000	61,788,826,497	(3,211,173,503)	(4.94)	13,917,279,197	373,576,644,921	387,493,924,118	14,963,921,419	322,527,525,284	337,491,446,703	(50,002,477,415)	(12.90)
Jumlah Penataan Ruang		65,000,000,000	61,788,826,497	(3,211,173,503)	(4.94)	13,917,279,197	373,576,644,921	387,493,924,118	14,963,921,419	322,527,525,284	337,491,446,703	(50,002,477,415)	(12.90)
1 06	Perencanaan Pembangunan												
1 06 0100	Badan Perencanaan Pembangunan	0	0	0	0	11,667,700,000	15,873,537,144	27,541,237,144	11,746,300,100	15,168,584,195	26,914,884,295	(626,352,849)	(2.27)
Jumlah Perencanaan Pembangunan		0	0	0	0	11,667,700,000	15,873,537,144	27,541,237,144	11,746,300,100	15,168,584,195	26,914,884,295	(626,352,849)	(2.27)
1 07	Perhubungan												
1 07 0100	Dinas Perhubungan	37,084,968,620	37,084,968,620	0	0	34,103,356,415	97,681,253,657	131,784,610,072	36,608,563,988	82,566,892,910	119,175,456,898	(12,609,153,174)	(9.57)
Jumlah Perhubungan		37,084,968,620	37,084,968,620	0	0	34,103,356,415	97,681,253,657	131,784,610,072	36,608,563,988	82,566,892,910	119,175,456,898	(12,609,153,174)	(9.57)
1 08	Lingkungan Hidup												
1 08 0100	Badan Lingkungan Hidup	8,500,000,000	7,500,000,000	(1,000,000,000)	(11.76)	5,901,375,262	16,009,091,804	21,910,467,066	5,696,549,098	15,780,339,239	21,476,888,337	(433,578,729)	(1.98)
1 08 0200	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	33,804,107,426	30,940,641,116	(2,863,466,310)	(8.47)	38,779,606,620	245,595,346,962	284,374,953,582	39,296,665,192	267,712,959,561	307,009,624,753	22,634,671,171	7.96
Jumlah Lingkungan Hidup		42,304,107,426	38,440,641,116	(3,863,466,310)	(9.13)	44,680,981,882	261,604,438,766	306,285,420,648	44,993,214,290	283,493,298,800	328,486,513,090	22,201,092,442	7.25
1 10	Kependudukan dan Catatan Sipil												
1 10 0100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	980,350,000	980,350,000	0	0	7,760,239,605	19,043,733,447	26,803,973,052	7,835,887,066	18,480,320,381	26,316,207,447	(487,765,605)	(1.82)
Jumlah Kependudukan dan Catatan Sipil		980,350,000	980,350,000	0	0	7,760,239,605	19,043,733,447	26,803,973,052	7,835,887,066	18,480,320,381	26,316,207,447	(487,765,605)	(1.82)
1 12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera												
1 12 0100	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	0	0	0	0	15,093,607,489	20,671,026,761	35,764,634,250	15,225,291,960	17,078,586,311	32,303,878,271	(3,460,755,979)	(9.68)
Jumlah Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera		0	0	0	0	15,093,607,489	20,671,026,761	35,764,634,250	15,225,291,960	17,078,586,311	32,303,878,271	(3,460,755,979)	(9.68)
1 13	Sosial												
1 13 0100	Dinas Sosial	0	0	0	0	6,742,456,693	34,794,441,059	41,536,897,752	6,773,570,595	30,409,011,033	37,182,581,628	(4,354,316,124)	(10.48)
Jumlah Sosial		0	0	0	0	6,742,456,693	34,794,441,059	41,536,897,752	6,773,570,595	30,409,011,033	37,182,581,628	(4,354,316,124)	(10.48)

[illegible]

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA							
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA		
		Rp.	Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
1 20 0100	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	0	0	0	15,984,866,750	0	15,984,866,750	16,049,151,032	0	16,049,151,032	64,284,282	0.40
1 20 0200	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0	0	0	0	2,188,883,385	0	2,188,883,385	2,189,813,185	0	2,189,813,185	929,800	0.04
1 20 0300	Sekretariat Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 20 0301	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0	0	0	0	2,263,677,760	3,031,731,130	5,295,408,890	2,316,066,455	3,172,526,127	5,488,592,582	193,183,692	3.65
1 20 0302	Bagian Hukum	0	0	0	0	3,606,016,026	3,920,759,826	7,526,775,852	3,630,880,968	3,920,759,826	7,551,640,794	24,864,942	0.33
1 20 0303	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	0	0	0	0	1,731,192,730	1,649,869,452	3,381,062,182	1,780,239,093	1,649,869,452	3,430,108,545	49,046,363	1.45
1 20 0304	Bagian Kerjasama	0	0	0	0	2,220,804,905	11,787,686,398	14,008,491,303	2,118,809,496	11,789,285,698	13,908,095,194	(100,396,109)	(0.72)
1 20 0305	Bagian Bina Program	0	0	0	0	3,972,415,142	7,841,470,444	11,813,885,586	4,004,002,991	7,830,029,917	11,834,032,908	20,147,322	0.17
1 20 0306	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah	0	0	0	0	1,320,640,953	1,592,875,914	2,913,516,867	1,387,151,049	1,654,497,756	3,041,648,805	128,131,938	4.40
1 20 0307	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	0	1,595,143,854	1,053,979,210	2,649,123,064	1,635,676,599	1,047,979,210	2,683,655,809	34,532,745	1.30
1 20 0308	Bagian Umum dan Protokol	0	0	0	0	13,964,235,735	35,370,005,855	49,334,241,590	13,740,217,517	47,803,880,258	61,544,097,775	12,209,856,185	24.75
1 20 0309	Bagian Perlengkapan	1,000,000,000	1,010,800,000	10,800,000	1.08	4,590,784,602	104,321,974,778	108,912,759,380	4,808,233,900	114,185,854,416	118,994,088,316	10,081,328,936	9.26
1 20 0310	Bagian Hubungan Masyarakat	0	0	0	0	2,209,772,146	5,387,300,249	7,597,072,395	1,940,096,715	5,691,764,079	7,631,860,794	34,788,399	0.46
1 20 0400	Sekretariat DPRD	0	0	0	0	5,643,900,291	69,466,620,693	75,110,520,984	5,951,649,330	69,852,103,197	75,803,752,527	693,231,543	0.92
1 20 0500	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan	4,314,219,090,314	4,430,674,519,697	116,455,429,383	2.70	390,389,356,515	49,555,841,364	439,945,197,879	407,814,764,926	43,493,738,930	451,308,503,856	11,363,305,977	2.58
1 20 0700	Inspektorat	0	0	0	0	6,513,512,000	4,967,131,328	11,480,643,328	6,444,288,650	5,040,534,298	11,484,822,948	4,179,620	0.04
1 20 0900	Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 20 0901	Kecamatan Genteng	0	0	0	0	6,608,686,368	3,885,386,129	10,494,072,497	6,489,998,163	3,925,277,319	10,415,275,482	(78,797,015)	(0.75)
1 20 0902	Kecamatan Simokerto	0	0	0	0	4,780,809,988	3,704,190,001	8,484,999,989	5,053,818,227	3,767,097,001	8,820,915,228	335,915,239	3.96
1 20 0903	Kecamatan Tegalsari	0	0	0	0	6,111,809,378	3,830,389,153	9,942,198,531	5,948,708,446	3,909,658,153	9,858,366,599	(83,831,932)	(0.84)
1 20 0904	Kecamatan Bubutan	0	0	0	0	5,725,784,388	3,965,158,180	9,690,942,568	5,860,789,138	4,019,545,629	9,880,334,767	189,392,199	1.95
1 20 0905	Kecamatan Kenjeran	0	0	0	0	4,598,967,515	3,445,881,034	8,044,848,549	4,613,607,375	3,518,842,925	8,132,450,300	87,601,751	1.09
1 20 0906	Kecamatan Pabean Cantian	0	0	0	0	5,458,618,594	4,070,750,789	9,529,369,383	5,360,255,687	4,134,276,602	9,494,532,289	(34,837,094)	(0.37)
1 20 0907	Kecamatan Semampir	0	0	0	0	5,037,840,000	4,728,244,543	9,766,084,543	4,985,014,559	4,845,723,443	9,830,738,002	64,653,459	0.66
1 20 0908	Kecamatan Krembangan	0	0	0	0	5,668,785,307	3,536,358,494	9,205,143,801	5,689,504,041	3,636,852,994	9,326,357,035	121,213,234	1.32
1 20 0909	Kecamatan Tambaksari	0	0	0	0	6,131,084,000	5,294,513,827	11,425,597,827	6,311,148,150	5,379,442,427	11,690,590,577	264,992,750	2.32
1 20 0910	Kecamatan Gubeng	0	0	0	0	6,070,612,000	4,268,963,984	10,339,575,984	6,271,785,887	4,351,553,584	10,623,339,471	283,763,487	2.74
1 20 0911	Kecamatan Rungkut	0	0	0	0	5,254,627,381	4,517,616,409	9,772,243,790	5,230,768,795	4,569,616,809	9,800,385,604	28,141,814	0.29
1 20 0912	Kecamatan Gunung Anyar	0	0	0	0	4,572,233,184	3,169,396,462	7,741,629,646	4,654,986,903	3,249,995,662	7,904,982,565	163,352,919	2.11
1 20 0913	Kecamatan Tenggilis Mejoyo	0	0	0	0	4,349,574,367	3,030,193,504	7,379,767,871	4,601,068,229	3,081,083,504	7,682,151,733	302,383,862	4.10

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA							
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
						TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA		
				Rp.	Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
1 26	Perpustakaan												
1 26 0100	Badan Arsip dan Perpustakaan	0	0	0	0	4,148,742,773	13,355,547,817	17,504,290,590	4,436,694,771	13,679,965,777	18,116,660,548	612,369,958	3.50
Jumlah Perpustakaan		0	0	0	0	4,148,742,773	13,355,547,817	17,504,290,590	4,436,694,771	13,679,965,777	18,116,660,548	612,369,958	3.50
Jumlah Urusan Wajib		4,605,245,737,151	4,692,983,236,554	87,737,499,403	1.91	1,950,376,033,788	3,150,528,550,625	5,100,904,584,413	2,027,786,316,745	3,061,078,395,336	5,088,864,712,081	(12,039,872,332)	(0.24)
2	Urusan Pilihan												
2 01	Pertanian												
2 01 0100	Dinas Pertanian	0	0	0	0	8,334,060,204	28,034,508,609	36,368,568,813	8,472,931,544	27,668,725,618	36,141,657,162	(226,911,651)	(0.62)
Jumlah Pertanian		0	0	0	0	8,334,060,204	28,034,508,609	36,368,568,813	8,472,931,544	27,668,725,618	36,141,657,162	(226,911,651)	(0.62)
2 06	Perdagangan												
2 06 0100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	455,000,000	378,312,510	(76,687,490)	(16.85)	12,799,988,993	16,983,562,597	29,783,551,590	12,551,214,694	20,707,246,722	33,258,461,416	3,474,909,826	11.67
Jumlah Perdagangan		455,000,000	378,312,510	(76,687,490)	(16.85)	12,799,988,993	16,983,562,597	29,783,551,590	12,551,214,694	20,707,246,722	33,258,461,416	3,474,909,826	11.67
Jumlah Urusan Pilihan		455,000,000	378,312,510	(76,687,490)	(16.85)	21,134,049,197	45,018,071,206	66,152,120,403	21,024,146,238	48,375,972,340	69,400,118,578	3,247,998,175	4.91
Jumlah		4,605,700,737,151	4,693,361,549,064	87,660,811,913	1.90	1,971,510,082,985	3,195,546,621,831	5,167,056,704,816	2,048,810,462,983	3,109,454,367,676	5,158,264,830,659	(8,791,874,157)	(0.17)

Surabaya, 22 Oktober 2012

WALIKOTA SURABAYA

TRI RISMAHARINI